

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Koperasi berkembang sesuai perubahan zaman dan tuntutan dari para anggota itu sendiri, serta berdiri untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran dan tugas koperasi itu sendiri adalah sebagai sarana meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia, serta mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara mengembangkan setiap potensi yang ada.

Sebagai suatu badan usaha yang berwatak sosial dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha milik negara dan swasta. Ciri utama koperasi adalah pengelolaan dan kelangsungan koperasi yang dikendalikan oleh anggota. Sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada anggota melalui rapat anggota tertinggi tahunan (RAT). Ciri lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanamkan modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pengguna jasa, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jenis-jenis koperasi di Indonesia dapat dibedakan dalam dua

kriteria yaitu berdasarkan jenis usahanya dan berdasarkan keanggotaannya. Apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha terdiri atas koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (USP), koperasi konsumsi dan koperasi produksi. Sedangkan jenis usaha koperasi berdasarkan keanggotaannya terdiri dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi sekolah, dan koperasi unit desa (KUD).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) yang telah berdiri sejak 1978 dengan badan hukum No.7085/BH/PAD/KWK.10/III/98 merupakan koperasi yang usahanya *multi purpose* artinya ada beberapa jenis usaha yang dijalankan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. KPRI-KPKS terletak di jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 75 Sumedang. Berikut beberapa bidang usaha diantaranya :

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Jasa
3. Unit Photo Copy dan Penjilidan
4. Unit Perdagangan Umum (Mini Market)
5. Unit Penyewaan alat pesta

KPRI-KPKS memiliki kekayaan atau aset yang merupakan sarana dalam menjalankan kegiatan operasional seperti bangunan atau gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain adalah aset yang digolongkan sebagai aset tetap. Aset tetap memiliki nilai yang material dan rentan terhadap kenaikan maupun penurunan nilai dalam laporan keuangan. Pada umumnya nilai ekonomi suatu aset akan mengalami penurunan yang disebabkan pemakaian, kerusakan dan

ketinggalan zaman. Setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien melalui metode manajemen aset yang tepat sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi koperasi.

Aset tetap menjadi komponen penting dalam menjalankan usaha. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 15.2 tentang aset tetap :

“Aset tetap adalah aset berwujud yang (1). Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa; untuk direntalkan kepada pihak lain; atau untuk tujuan administratif; dan (2). Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Banyak koperasi yang belum memahami betapa pentingnya manajemen aset dan menganggap manajemen aset hanya sekedar instrumen pengelolaan daftar aset (inventaris). Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan, praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.

Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK 16 adalah :

“Penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar”.

Penilaian kembali aset tetap akan mencerminkan nilai buku ataupun nilai wajar dan beban penyusutan yang lebih realistis agar dapat diketahui kemampuan

dan nilai kekayaan perusahaan yang sebenarnya., kemudian perubahan ini akan menyebabkan perubahan juga pada komposisi aset (aset tetap) dan modal (ekuitas) koperasi, sehingga berdampak pada laporan keuangan khususnya laporan neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

Terdapat Penelitian terdahulu yang membahas kaitan antara penilaian kembali aset tetap dan dampaknya pada suatu variabel. Penelitian terdahulu ini diharapkan menjadi landasan berpikir Peneliti, sebagai berikut:

Wenefrida SA (2001) melakukan Penelitian mengenai “Pengaruh Revaluasi Aset Tetap terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dan Pajak”. Hasil akhir yang diperoleh dari Penelitian ini adalah :

“Revaluasi aset tetap berpengaruh pada neraca pos aset dan pos modal dengan bertambahnya sejumlah selisih revaluasi aset tetap. Dengan demikian aset perusahaan mengalami kenaikan setelah dilakukannya kegiatan revaluasi. Atas kenaikan aset tersebut perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan sebesar 10% dari selisih revaluasi. Revaluasi tersebut juga akan mempengaruhi perhitungan penyusutan aset tetap yaitu dasar penyusutan yang dipakai untuk periode setelah dilakukannya revaluasi adalah sebesar nilai wajar aset. Manfaat dari kegiatan revaluasi selain memperbaiki posisi keuangan perusahaan adalah dapat mempermudah perusahaan mengajukan pinjaman jangka panjang”.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa revaluasi aset tetap dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas. Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat. Selisih lebih penilaian kembali akan meningkatkan struktur modal sendiri sehingga perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga.

Adapun informasi laporan keuangan koperasi berkenaan dengan

perbandingan omset koperasi, perhitungan hasil SHU dalam lima tahun terakhir dan data perbandingan harga perolehan kelompok aset tetap tanah yang dimiliki koperasi dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak untuk menunjukkan jauhnya nilai antara nilai perolehan dan nilai wajar aset sehingga pentingnya kegiatan penilaian aset tetap dilakukan pada koperasi, data dipaparkan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Perbandingan harga perolehan kelompok aset tetap tanah dan bangunan serta nilai wajar aset tanah dan bangunan berdasarkan NJOP

No	Kelompok Aset	Tahun Perolehan	Nilai Buku (Rp) Per 31 Des 2017	Nilai Wajar (Rp)
1.	Tanah Kantor	1999	203.296.000	820.456.000
2.	Bangunan Kantor	1999	380.741.779	854.400.000

Sumber: Laporan Keuangan KPRI-KPKS

Tabel 1.2 Ringkasan Laporan Keuangan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi

No	Tahun	Uraian		
		Total pendapatan koperasi	Total Keseluruhan Biaya	SHU bersih setelah pajak
1.	2013	Rp 3.447.817.225	Rp 3.230.961.180	Rp 216.856.045
2.	2014	Rp 3.555.735.376	Rp 3.091.094.148	Rp 464.641.228
3.	2015	Rp 4.075.786.108	Rp 3.461.422.917	Rp 614.363.191
4.	2016	Rp 4.456.990.087	Rp 3.742.925.304	Rp 714.064.783
5.	2017	Rp 4.653.557.034	Rp 3.753.311.829	Rp 900.245.205

Sumber: Laporan Keuangan KPRI-KPKS tahun 2013-2017

Pada informasi tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa aset tetap KPRI-KPKS masih memiliki nilai buku berdasarkan harga perolehan (*cost model*) yang dikurangi akumulasi penyusutan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nilai buku pada aset tetap diatas dibandingkan dengan nilai wajar aset yang diperoleh dari informasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) aset koperasi. Pada tabel 1.2 dijabarkan data dari laporan keuangan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) koperasi

yakni total pendapatan dikurang total biaya hingga didapatkan total sisa hasil usaha yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam hal pendapatan dan SHU setelah pajak.

Penilaian kembali aset tetap yang dimiliki KPRI-KPKS kemudian menjadi menarik untuk dilakukan, karena KPRI-KPKS belum pernah melakukan penilaian kembali aset tetap. Jika pencatatan aset tetap terus dilakukan seperti sekarang, maka laporan keuangan koperasi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jika dilakukan penilaian kembali aset tetap maka nilai aset tetap setelah penilaian dapat lebih tinggi atau justru lebih rendah dibanding nilai aset tetap yang dicatat berdasarkan pencatatan sebelumnya, sehingga berdampak pada perubahan laporan keuangan koperasi terutama pada komposisi aset (aset tetap) dan modal (ekuitas) koperasi, sehingga dapat menjadi dasar penentuan kebijakan koperasi yang lebih sesuai dan realistis.

Pelaporan transaksi ekonomi dituangkan dalam Laporan Keuangan yang harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan sehingga dapat di audit secara ekstern karena mengikuti standar tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mempunyai 4 pilar yang diadopsi dari IFRS (*Internasional Financial reporting Standard*) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan yaitu, dasar yang digunakan untuk menilai kembali aset, tanggal efektif penilaian

kembali, jumlah tercatat setiap jenis aset tetap, dan surplus penilaian kembali aset tetap.

Laporan keuangan bagi setiap orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan sangatlah perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan. Dengan menganalisa pos-pos neraca akan dapat diketahui gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan menganalisa laporan perhitungan hasil usaha akan dapat diketahui perkembangan tentang perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP DALAM UPAYA MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN YANG SESUAI DENGAN KONDISI AKTUAL”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana penyajian nilai aset tetap pada KPRI-KPKS sebelum dilakukan penilaian kembali aset tetap.
2. Bagaimana penyajian nilai aset tetap pada KPRI-KPKS setelah pengakuan awal berdasarkan Model Harga Perolehan (*Cost Model*) dan Model Revaluasi (*Revaluation Model*).
3. Bagaimana penyajian laporan keuangan KPRI-KPKS yang sesuai dengan kondisi aktual.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi sebagai dasar dalam mendukung pemecahan masalah yang diteliti pada KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penyajian nilai aset tetap pada KPRI-KPKS sebelum dilakukan penilaian kembali aset tetap.
2. Penyajian nilai aset tetap pada KPRI-KPKS setelah pengakuan awal berdasarkan Model Harga Perolehan (*Cost Model*) dan Model Revaluasi (*Revaluation Model*).
3. Penyajian laporan keuangan KPRI-KPKS yang sesuai dengan kondisi aktual.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Manajemen Keuangan khususnya mengenai analisis penilaian kembali aset tetap dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi aktual pada KPRI-KPKS.

2. Aspek Guna Laksana

- a. Bagi KPRI-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KPRI-KPKS berupa hasil informasi mengenai hasil-hasil kajian terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk

terus meningkatkan kinerjanya.

b. Bagi Peneliti

Penulis berharap penelitian ini dapat menumbuhkan rasa kebanggaan dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap koperasi.

c. Bagi Institut Koperasi Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan berarti untuk memperluas wacana sekaligus melengkapi referensi kepustakaan dan memberikan dorongan kepada semua pihak terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

d. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang serupa serta dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut, dan sebagai pengubah cara pandang yang lebih positif terhadap koperasi.



IKOPIN